



**ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP KETIMPANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH DI SUMATERA BARAT**


**OLEH : NILA SILVIA
BP. 06151109**

Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi*

PROGRAM S1

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2010**

	No. Alumni Universitas	NILA SILVIA	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a) Tempat/Tanggal Lahir : Bandung / 23 Mei 1988 b) Nama Orang Tua : Asril Hasan & Arniaty Ramly c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No. BP : 06151109 f) Tanggal Lulus : 31 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,38 i) Lama Studi : 4 Tahun h) Alamat Orang Tua : Kampung Tanjung Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Pataman, Kabupaten Padang Pariaman

Analisis Dampak Desentralisasi Terhadap Ketimpangan Perekonomian Daerah Di Sumatera Barat

Skripsi S1 oleh: Nila Silvia



Pembimbing Skripsi: Drs.H. Zulkaraini Ras, M.Si

Abstrak

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi) diharapkan mampu mengatasi ketimpangan perekonomian antar daerah. Ketimpangan antar daerah ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan sektor ekonomi unggulan yang dimiliki suatu daerah. Penelitian ini mencoba mengurai permasalahan diatas dengan menggunakan Analisis Location Quation, Shift Share Analisis, dan Tipology Klassen. Dengan menggunakan ketiga alat analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa setelah desentralisasi sebagian besar kabupaten / kota mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sektor basisnya. Walaupun demikian ketimpangan antar kabupaten / kota semakin besar karena terdapatnya perbedaan kemampuan daerah untuk memaksimalkan potensi sektor basisnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 31 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3.
Nama Terang	Drs. H. Zulkarnaini Ras M.Si (Pembimbing)	Dra. Syukriati/Syukur M.Si (Pembahas I)	Lukman, SE, M.Si (Pembahas II)

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahap pembangunan di Indonesia, dimana pada saat itu merupakan masa pemerintahan orde baru yang berkuasa, pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan untuk menitikberatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas pembangunan. Hal ini bertujuan agar dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan sehingga dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai maka kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat dari waktu ke waktu (Soekirno, 1985).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memulai pembangunan ekonomi nasional di Pulau Jawa. Alasan fokus pembangunan dilakukan di Pulau Jawa karena adanya ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut dibandingkan dengan daerah – daerah lainnya. Selain itu pembangunan hanya terpusat pada sektor tertentu yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Dengan melakukan hal tersebut dipercayai bahwa nantinya hasil dari pembangunan tersebut akan menetes pada sektor lainnya dan wilayah Indonesia nantinya (*trickle down effect*) (Tambunan, dalam Parhah 2006).

Sehingga dapat kita ketahui bahwa selama masa pemerintahan orde baru telah terbangun sistem pemerintahan sentralistik, dimana pemerintah pusat

memegang kendali penuh terhadap pemerintah daerah. Ruang yang diberikan bagi aparat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sangat sempit, bahkan kerap kali potensi yang ada di daerah tersentral kepusat, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dari segi pembangunan, akses informasi dan terutama kemakmuran masyarakatnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipastikan bahwa pada era orde baru inilah awal bermulanya ketidakseimbangan dalam pembangunan antar daerah yang akhirnya berujung pada ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul baik dari tingkat nasional maupun dari tingkat daerah akibat kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru ini, maka terjadinya reformasi politik yang disertai reformasi ekonomi, sehingga diterapkanlah kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) sebagai solusi alternatif dalam mengatasi berbagai masalah diatas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, setelah dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang pelaksanaan sistem desentralisasi. Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh (Sofwani, 2002).

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan Tipologi Klassen serta digabungkan alat analisa lainnya yaitu tipologi sektoral, maka terdapat perbedaan yang nyata signifikan antara kondisi perekonomian di kabupaten / kota di Sumatera Barat pada sebelum dan setelah adanya desentralisasi ekonomi, yaitu;

1. Tabel berikut ini akan melihat bagaimana bentuk daerah yang maju dan daerah tertinggal di kabupaten / kota sebelum dan setelah desentralisasi.

Tabel 6.1 Pengelompokan Daerah Maju Dan Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat

No.	Indikator	Sebelum Desentralisasi		Setelah Desentralisasi	
		Daerah Maju	Daerah tertinggal	Daerah Maju	Daerah tertinggal
1	Jumlah daerah	6 daerah	4 daerah	2 daerah	5 daerah
2	Hubungan g^* dengan g^{**}	$g^* > g^{**}$	$g^* < g^{**}$	$g^* > g^{**}$	$g^* < g^{**}$
3	Hubungan Y^* dengan Y^{**}	$Y^* > Y^{**}$	$Y^* > Y^{**}$	$Y^* > Y^{**}$	$Y^* > Y^{**}$
4	Sektor Basis yang dominan	9, 8, 5, 7, 4	1	4, 7, 8, 9	1, 5, 9
5	Jml rata-rata sektor basis	5 sektor basis	2 sektor basis	5 sektor basis	3 sektor basis
6	Tingkat Kepotensialan Sektor basis	II dan III	II dan III	I	I dan II

eterangan:

- ♦ 1 = Sektor Pertanian, 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalan, 3 = Sektor Industri Pengolahan, 4 = Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, 5 = Sektor Bangunan, 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, 7 = Sektor Pengangkutan & Komunikasi, 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, 9 = Sektor Jasa-jasa.
- ♦ Tingkat kepotensialan; I = Istimewa, II = Baik Sekali, III = Baik, IV = Lebih dari Cukup
- ♦ g^* = rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah dan g^{**} = rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat
- ♦ Y^* = rata-rata tingkat PDRB perkapita daerah dan Y^{**} = rata-rata tingkat PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro, 2002, "Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method." www.proquest.com/pqdweb
- Akai, Nobuo, 2005, "Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States". www.proquest.com/pqdweb
- BAPPENAS, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia, 2007, "Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah".
- Badan Pusat Statistik, 2003, "Produk Domestik Bruto Kota Padang", Padang, BPS
- Boediono, 1985, Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Brodjonegoro, Bambang P.S, 2001. "The impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies: A Simultaneous Econometrics Approach." Vanersborg, Sweden: Udavella Symposium 2001: Regional Economies in Transitions.
- Fatmasari, Wulan, 2007, "Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang (Pendekatan Model Basis Ekonomi)" Skripsi S-1, Universitas Negeri Semarang.
- Irawan, Toni dan Hartono, Djoni, 2008, "Decentralization Policy and Equality: A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality".
- Islam, Yanatul dan Khan, Habibullah, 1986. "Spatial Patterns of Inequality and Poverty in Indonesia." Bulletin of Indonesia Economics Studies, www.proquest.com/pqdweb